

Deviasi Khittah dan Politik Oposisi Lokal: Komunikasi Politik *Mathla'ul Anwar* dalam Kontestasi Elektoral Banten

Iin Solihin

FISIP Universitas Mathla'ul Anwar Banten

iin804601@gmail.com

Mohamad Asrori Mulky

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

moh.asrori.mulky@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima: 15 Januari 2026

Revisi: 06 Februari 2026

Terbit: 14 Februari 2026

Kata Kunci:

Komunikasi Politik

Khittah

Deviasi

Oposisi

Elektoral

ABSTRACT

This article examines the deviation from the organizational khittah of Mathla'ul Anwar (MA) within the context of local political opposition by analyzing MA's political communication during the 2017 Banten gubernatorial election. The study focuses on the role of organizational elites as political communicators, decision-making patterns, and their implications for internal fragmentation and MA's position as a cultural Islamic organization. Employing a qualitative descriptive-analytical approach, the research draws on in-depth interviews, document analysis, and discourse analysis. The findings reveal that elite-driven political endorsements with limited deliberative consultation shifted MA's political communication from an ethical, shura-based practice toward top-down symbolic mobilization. This shift generated tensions between structural and cultural factions and signaled a deviation from MA's foundational khittah. From the perspective of Islamic Political Thought, this case highlights the challenges of political ijihad faced by Islamic organizations in local electoral democracies characterized by dynastic politics and informal power relations, while underscoring the importance of ethical and deliberative political communication.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis deviasi khittah Mathla'ul Anwar (MA) dalam konteks politik oposisi lokal melalui kajian komunikasi politik MA pada Pilkada Banten 2017. Kajian difokuskan pada peran elite organisasi sebagai komunikator politik, pola pengambilan keputusan, serta implikasinya terhadap fragmentasi internal dan posisi MA sebagai ormas Islam kultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan politik yang bersifat elitis dan minim mekanisme musyawarah telah menggeser komunikasi politik MA dari praksis etis berbasis shura menuju mobilisasi simbolik yang top-down. Kondisi ini memicu konflik antara faksi struktural dan kultural serta menandai deviasi khittah organisasi. Dalam perspektif Pemikiran Politik Islam, temuan ini menegaskan problem ijihad politik ormas Islam dalam demokrasi elektoral lokal yang ditandai oleh politik dinasti dan relasi kekuasaan informal, sekaligus menekankan urgensi komunikasi politik Islam yang etis dan deliberatif.

PENDAHULUAN

Organisasi-organisasi Islam di Indonesia memiliki peran historis dan strategis dalam membentuk kesadaran keummatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Sejak masa pergerakan nasional hingga era demokrasi elektoral, ormas Islam berfungsi tidak hanya sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai aktor masyarakat sipil yang memproduksi nilai, wacana, dan orientasi politik umat (Hefner, 2011; Fealy & White, 2008). Dalam perspektif Pemikiran Politik Islam, peran ini dilekatkan pada tanggung jawab moral untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* serta menjaga kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*) dalam kehidupan sosial dan politik (Al-Mawardi, 1996). Oleh karena itu, keterlibatan ormas Islam dalam politik selalu berada dalam ketegangan antara idealisme normatif dan realitas kekuasaan.

Salah satu organisasi Islam yang lahir dari konteks sosial-keagamaan lokal adalah Mathla'ul Anwar (MA), yang didirikan pada tahun 1916 di Menes, Pandeglang, Banten. MA tumbuh sebagai gerakan Islam kultural yang menitikberatkan aktivitasnya pada bidang pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan, dengan basis utama madrasah dan pesantren. Sejak awal berdirinya, MA menegaskan sikap non-partisan dalam politik praktis sebagai bagian dari *khittah* organisasi. Sejak kelahirannya, MA memosisikan diri sebagai gerakan dakwah dan pendidikan yang menjaga jarak dari politik praktis demi menjaga independensi moral organisasi.

Namun, dinamika politik lokal pasca-reformasi, khususnya sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung, menghadirkan tantangan serius bagi konsistensi *khittah* organisasi keagamaan. MA dalam perjalannya mengalami disorientasi sebagai gerakan kultural (pendidikan, dakwah dan sosial) menuju gerakan politik (Sarjaya, 1996). Demokrasi elektoral membuka ruang kompetisi politik yang semakin intens, sehingga ormas Islam kerap diperebutkan sebagai sumber legitimasi simbolik dan basis mobilisasi massa. Dalam konteks ini, komunikasi politik tidak lagi sekadar proses penyampaian pesan, melainkan arena produksi makna dan perebutan otoritas moral di ruang publik (McNair, 2018).

Dalam perspektif Pemikiran Politik Islam, komunikasi politik tidak semata dipahami sebagai proses transmisi pesan untuk memperoleh dukungan kekuasaan, tetapi sebagai bagian dari praksis etika (*akhlaq al-siyasah*) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum atau *maslahah 'ammah* (Al-Mawardi, 1996; Al-Ghazali, 2000; Hefner, 2011). Al-Qur'an menegaskan prinsip komunikasi yang berlandaskan kebenaran dan kejujuran (*qaulan sadidan*), kesantunan (*qaulan layyinan*), dan kejelasan pesan (*qaulan balighan*) (QS. al-Ahzab: 70; QS. Thaha: 44; QS. an-Nisa': 63). Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi normatif komunikasi politik Islam, yang membedakannya dari pendekatan pragmatis-instrumental dalam teori komunikasi politik modern.

Dalam khazanah klasik, pemikir seperti Al-Mawardi memandang komunikasi politik sebagai instrumen pengikat antara penguasa dan umat melalui nasihat (*nashihah*), musyawarah (*syura*), dan representasi kepentingan publik (Al-Mawardi, 1996). melalui nasihat (*nashihah*), musyawarah (*syura*), dan representasi kepentingan publik. Sementara itu, Ibn Taimiyah menekankan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam relasi politik agar otoritas tidak menjelma menjadi dominasi simbolik yang menindas dan otoriter (Ibn Taimiyah, 2005) Dengan demikian, komunikasi politik Islam mengandung dimensi normatif, partisipatif, dan transformatif sekaligus.

Dalam konteks organisasi Islam kontemporer, komunikasi politik idealnya dijalankan sebagai proses pendidikan politik umat (*tarbiyah siyāsiyyah*). Pendidikan politik ini bertujuan membangun kesadaran kritis umat terhadap kekuasaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar mengarahkan pilihan elektoral secara pragmatis (Esposito & Voll, 2001). Komunikasi politik yang bersifat edukatif mendorong umat untuk memahami politik sebagai bagian dari ibadah sosial dan tanggung jawab moral, bukan arena perebutan kepentingan semata.

Oleh karena itu, organisasi Islam berfungsi sebagai mediator nilai-nilai etis Islam ke dalam ruang publik demokratis. Setiap pesan dan sikap politik yang disampaikan atas nama organisasi idealnya lahir dari mekanisme musyawarah dan kesadaran kolektif, bukan keputusan elitis yang tertutup. Ketika komunikasi politik dijalankan secara top-down dan mengabaikan prinsip *syura*, organisasi Islam berisiko mengalami erosi legitimasi moral dan deviasi dari khittahnya sebagai gerakan etis dan kultural. Dalam konteks inilah komunikasi politik Islam menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara keterlibatan politik dan integritas moral organisasi.

Fenomena tersebut tampak secara konkret dalam Pilkada Banten 2017. Pada momentum ini, Ketua Pengurus Wilayah Mathla'ul Anwar (PWMA) Banten, Babay Sujawandi, secara terbuka mendeklarasikan dukungan organisasi kepada salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Rano-Embey Mulya Syarif. Deklarasi dukungan politik yang dilakukan Ketua PWMA Banten itu disampaikan secara terbuka dan mengatasnamakan organisasi, sehingga memunculkan kesan keterlibatan struktural Mathla'ul Anwar dalam politik elektoral. Tindakan ini menandai pergeseran penting dalam praktik komunikasi politik MA di tingkat lokal.

“Ketua Pengurus Wilayah Mathla'ul Anwar (PWMA) Banten Babay Sujawandi secara resmi mendeklarasikan dukungan pasangan Rano Karno-Embey Mulya Syarif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017. Kami akan menyosialisasikan pasangan Rano-Mulya ke semua perguruan Mathla'ul Anwar dan alumni yang tersebar di berbagai pelosok di Banten. Kami yakin warga Mathla'ul Anwar akan menerima pasangan Rano-Mulya, karena setelah road show ke sejumlah perguruan, mereka pada umumnya menyambut positif pa

sangan Rano-Mulya". <http://satelitnews.co.id/2016/10/11/mathlaul-anwar-dukung-rano-embay-> (Iin, 2018)

Deklarasi politik tersebut memicu polemik internal yang tajam di tubuh MA. Sebagian elite dan kader organisasi memandang keterlibatan politik sebagai ikhtiar strategis untuk memperjuangkan kepentingan umat melalui jalur struktural kekuasaan, sejalan dengan pendekatan *fiqh siyarah* yang pragmatis dan kontekstual. Namun, di sisi lain, muncul penolakan dari kelompok internal yang menilai sikap tersebut sebagai penyimpangan dari visi, *khittah*, dan identitas MA sebagai gerakan Islam kultural non-partisan. Perbedaan sikap ini berkembang menjadi konflik terbuka dan memperlihatkan fragmentasi internal organisasi. (Iin, 2018).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan organisasi Islam dalam politik elektoral kerap berada dalam ketegangan antara idealisme moral dan kepentingan kekuasaan (Hefner, 2011; Fealy & White, 2008). Studi-studi tentang politik lokal Indonesia juga menegaskan kuatnya pengaruh politik dinasti dan relasi patronase yang melibatkan aktor-aktor keagamaan sebagai sumber legitimasi simbolik (Hamid, 2014; Buehler, 2016). Namun, kajian yang ada umumnya menempatkan ormas Islam sebagai aktor eksternal dalam kontestasi politik, dengan fokus pada relasi institusional dan mobilisasi massa. Dimensi komunikasi politik internal organisasi, khususnya peran elite sebagai komunikator politik dan dampaknya terhadap kohesi internal serta konsistensi *khittah* organisasi, masih relatif kurang mendapat perhatian. Selain itu, kajian komunikasi politik Islam cenderung bersifat normatif-konseptual dan belum banyak diuji melalui studi empirik pada konteks politik elektoral lokal.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis komunikasi politik Mathla'ul Anwar dalam kontestasi elektoral Banten pada tahun 2017 sebagai kasus politik oposisi lokal ormas Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis empirik komunikasi politik elite ormas Islam dengan kerangka normatif Pemikiran Politik Islam, khususnya prinsip *syura*, etika komunikasi politik, dan ijtihad politik. Dengan memperkenalkan deviasi *khittah* sebagai kategori analitis, artikel ini menunjukkan bahwa praktik komunikasi politik yang elitis dan top-down tidak hanya memicu fragmentasi internal, tetapi juga menggerus legitimasi moral ormas Islam dalam demokrasi elektoral lokal yang ditandai oleh politik dinasti dan relasi kekuasaan informal.

Perbedaan pandangan di internal MA pasca mengusung calon tertentu tidak hanya mencerminkan perbedaan orientasi politik, tetapi juga mengindikasikan problem komunikasi politik di internal organisasi. Dalam perspektif komunikasi politik Islam, absennya mekanisme musyawarah yang inklusif dan deliberatif berpotensi menggeser komunikasi dari praksis etis menjadi instrumen legitimasi elite (Habermas, 1996). Elite organisasi yang seharusnya berperan sebagai *ahl al-ra'y* dan penjaga etika politik justru

tampil dominan sebagai komunikator politik tunggal, sehingga pesan politik dipersepsi sebagai instruksi kekuasaan, bukan hasil konsensus jamaah (Cangara, 2016).

Berdasarkan konteks tersebut, tulisan ini mengkaji bagaimana komunikasi politik Mathla'ul Anwar dijalankan dalam kontestasi elektoral di Banten, bagaimana peran elite organisasi sebagai komunikator politik, serta apa implikasinya terhadap kohesi internal dan posisi politik MA sebagai ormas Islam. Kajian ini penting untuk memperkaya diskursus Pemikiran Politik Islam mengenai relasi antara ormas keagamaan, etika komunikasi politik, dan demokrasi elektoral di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif-analitis yang berfokus pada dinamika komunikasi politik Mathla'ul Anwar (MA) dalam kontestasi elektoral Pilkada Banten 2017. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran elite organisasi sebagai komunikator politik, proses pengambilan keputusan politik, serta implikasinya terhadap kohesi internal dan konsistensi khittah organisasi dalam konteks politik elektoral lokal.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komunikasi politik yang dikontekstualisasikan dengan kerangka Pemikiran Politik Islam. Pendekatan ini memungkinkan analisis atas praktik komunikasi politik MA tidak hanya sebagai strategi elektoral, tetapi juga sebagai praktik etis dan normatif yang beririsan dengan prinsip *syura*, etika politik Islam, serta relasi kuasa dalam organisasi keagamaan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan elite dan aktor internal MA yang terlibat langsung dalam dinamika politik Pilkada Banten 2017. Data sekunder diperoleh dari dokumen organisasi, keputusan resmi, pemberitaan media, dan literatur akademik. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola komunikasi politik, mekanisme pengambilan keputusan, serta indikasi deviasi khittah dan fragmentasi internal organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mathla'ul Anwar sebagai Ormas Islam dan Infrastruktur Politik

Mathla'ul Anwar (MA) merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial dengan orientasi kultural. Nama Mathla'ul Anwar berasal dari bahasa Arab yang berarti "tempat terbitnya cahaya". Organisasi ini didirikan pada 10 Juli 1916/1334 H di Menes, Pandeglang, Banten, sebagai respons atas kondisi sosial-keagamaan masyarakat yang diliputi kemiskinan, kebodohan, dan rendahnya akses pendidikan formal (Djuwaeli, 1996). Hingga kini, MA telah berkembang menjadi

organisasi nasional dengan perwakilan di sekitar 30 provinsi, mengelola lebih dari 2.000 satuan pendidikan dan 70 perguruan tinggi, termasuk Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) di Pandeglang yang berdiri sejak 2001.

Lahirnya MA tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah Banten pada akhir abad ke-19, ketika tingkat buta huruf masih tinggi dan pendidikan kolonial Belanda tidak dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, praktik keagamaan masyarakat banyak dipengaruhi oleh *takhayul, bid'ah, dan khurafat* (TBC). Kondisi ini, menurut Fauzan Saleh (2004), merupakan dampak dari proses Islamisasi pada masa Kesultanan Banten yang lebih berorientasi pada ekspansi kekuasaan daripada pendalaman dakwah. Situasi tersebut mendorong para ulama lokal untuk merintis lembaga pendidikan formal berbasis Islam sebagai sarana transformasi sosial dan pemurnian ajaran keagamaan.

Para ulama di Kananga Menes, seperti KH. Mohammad Entol Yasin dan KH. Mohammad Soleh, bersama tokoh-tokoh lainnya, kemudian menyepakati pendirian lembaga pendidikan modern berbentuk madrasah. Konsep madrasah ini dirumuskan secara sistematis oleh KH. Mas Abdurrahman dan diberi nama Mathla'ul Anwar. Pendirian MA dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga untuk mengimbangi sekolah-sekolah kolonial yang meniadakan pelajaran agama serta keterbatasan sistem pesantren tradisional yang saat itu belum menarik minat generasi muda (Nata, 2001).

Secara organisatoris, MA menetapkan tujuan sebagai organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial dengan berakidah *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan berasaskan Pancasila. Tujuan tersebut mencakup pembentukan masyarakat Indonesia yang beriman, berilmu, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kepribadian kebangsaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, MA mengembangkan berbagai bidang kerja, mulai dari pendidikan dan penelitian, dakwah dan penerangan, pembinaan pemuda dan muslimah, hingga kerja sama nasional dan internasional. Garis perjuangan ini dirumuskan dalam *khittah* organisasi sebagai pedoman utama gerak MA (Sarjaya, 1996).

Khittah MA menegaskan posisi organisasi sebagai gerakan Islam kultural yang berfokus pada penguatan pendidikan, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, dan pelayanan sosial. Dalam bidang pendidikan, MA bertujuan mencetak generasi Muslim yang sadar akan perannya sebagai khalifah di muka bumi melalui integrasi iman, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Dalam bidang dakwah, MA menekankan pendekatan yang kontekstual dan persuasif sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran. Sementara itu, dalam bidang sosial, MA berupaya mengatasi kemiskinan dan kebodohan sebagai bagian dari tanggung jawab keummatan. Peran besar para pendiri seperti KH. Mohammad Soleh, KH. Mohammad Entol Yasin, dan KH. Mas Abdurrahman menunjukkan bahwa MA sejak awal dirancang sebagai instrumen transformasi sosial-keagamaan yang berakar kuat pada masyarakat lokal Banten (Syatibi, 2006).

Dalam kerangka komunikasi politik Islam, ormas Islam seperti Mathla'ul Anwar berfungsi sebagai *wasithah* (mediator) antara nilai-nilai normatif Islam dan praktik kekuasaan. Fungsi ini menempatkan MA bukan hanya sebagai aktor sosial, tetapi juga sebagai subjek etis dalam sistem politik. Jaringan pendidikan, pesantren, dan dakwah yang dimiliki MA merupakan medium komunikasi politik kultural yang efektif dalam membentuk opini dan orientasi politik warga.

Sebagai infrastruktur politik masyarakat sipil, MA idealnya menjaga posisi independen dan kritis terhadap kekuasaan (Almond & Verba, 1989; Hefner, 2011). Sikap non-partisan bukan berarti apolitis, melainkan strategi komunikasi politik Islam untuk menjaga jarak kritis (*critical distance*) agar organisasi tetap mampu menjalankan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar* secara objektif. Ketika independensi ini terganggu oleh keberpihakan elektoral formal, maka fungsi komunikasi etis MA berpotensi mengalami erosi.

Sebagai ormas Islam dengan basis pendidikan dan sosial yang kuat, MA memiliki modal sosial yang signifikan di Provinsi Banten. Jaringan madrasah, pesantren, alumni, dan simpatisan menjadikan MA sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil yang potensial dalam mempengaruhi opini publik. Dalam perspektif komunikasi politik, posisi ini menempatkan MA sebagai bagian dari infrastruktur politik yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat kepada suprastruktur politik. Namun, fungsi tersebut menuntut sikap independen dan kemampuan komunikasi yang inklusif. Ketika organisasi secara formal berpihak pada salah satu kandidat, fungsi mediasi dan kontrol sosial berpotensi melemah.

Elite Organisasi sebagai Komunikator Politik

Dalam perspektif komunikasi politik Islam, elite organisasi keagamaan menempati posisi strategis sebagai *ahl al-ra'y*, yakni aktor yang memiliki otoritas moral, intelektual, dan simbolik dalam menafsirkan realitas sosial-politik serta menyampaikannya kepada umat. Peran ini meniscayakan keterikatan pada prinsip *musyawarah*, *amanah*, dan *maslahah 'ammah*, sehingga komunikasi politik tidak berubah menjadi dominasi elite, melainkan menjadi ruang deliberasi kolektif (al-Mawardi, 1996; al-Qaradawi, 1997). Dalam MA, ideal normatif tersebut diuji secara serius dalam peristiwa Pilkada Banten 2017, ketika organisasi ini untuk pertama kalinya terlibat secara eksplisit dalam dukungan politik elektoral.

Elite utama yang berperan sebagai komunikator politik dalam kasus ini adalah Babay Sujawandi, Ketua Pengurus Wilayah Mathla'ul Anwar (PWMA) Banten periode 2015–2020. Posisi Babay tidak hanya sebagai pimpinan struktural organisasi, tetapi juga sebagai mantan anggota DPRD Provinsi Banten (2004–2009), yang memberinya modal politik, pengalaman komunikasi publik, dan legitimasi simbolik di hadapan warga MA.

Kombinasi antara otoritas struktural dan pengalaman politik inilah yang menjadikannya aktor dominan dalam mengartikulasikan sikap politik organisasi.

Merujuk pada teori Dan Nimmo, Babay Sujawandi dapat dikategorikan sebagai *symbol broker*, yakni elite yang memproduksi, menafsirkan, dan mendistribusikan simbol-simbol politik kepada khalayak untuk membentuk persepsi dan orientasi politik tertentu (Nimmo, 2005; McNair, 2018). Dalam komunikasi politiknya, Babay membingkai dukungan MA terhadap pasangan Rano Karno–Embey Mulya Syarif sebagai pilihan moral untuk melawan korupsi dan politik dinasti yang mengakar di Banten. Isu “pemerintahan bersih” dan “anti-dinasti” dijadikan simbol utama untuk mengonsolidasikan dukungan warga MA.

Dalam salah satu pernyataannya, Babay Sujawandi secara eksplisit menyampaikan keyakinannya bahwa warga MA akan menerima keputusan politik tersebut: “*Kami yakin warga Mathla’ul Anwar akan menerima pasangan Rano–Embey, karena setelah roadshow ke sejumlah perguruan, mereka pada umumnya menyambut positif pasangan Rano–Embey*” (Babay Sujawandi, dikutip dalam Iin, 2018). Pernyataan ini menunjukkan bagaimana elite organisasi memosisikan diri sebagai representasi kehendak kolektif, meskipun proses musyawarah internal masih menyisakan perbedaan pandangan yang tajam sehingga terbelah menjadi pro dan kontra.

Dari perspektif komunikasi politik Islam, praktik ini mengandung problem etik. Simbol politik keagamaan, seperti narasi *amar ma’ruf nahi munkar* dan perlawanan terhadap kezaliman, tidak boleh dimonopoli oleh elite karena berpotensi melahirkan *taghallub* (dominasi simbolik) dan mengikis prinsip kesetaraan umat dalam pengambilan keputusan politik (al-Jabiri, 2001). Ketika pesan politik tidak melalui mekanisme musyawarah yang inklusif, komunikasi berubah dari praksis etis menjadi instrumen legitimasi kekuasaan elite. Praktik semacam ini tentu saja sangat berbahaya bagi kelangsungan sebuah organisasi seperti MA yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip demokratis.

Selain Babay Sujawandi, elite lain yang turut berperan dalam komunikasi politik MA adalah tokoh-tokoh pengurus daerah (PDMA), pimpinan lembaga pendidikan MA, serta tokoh agama lokal yang dirangkul untuk memperluas jangkauan pesan politik. Konsolidasi dilakukan melalui forum-forum internal, kunjungan ke madrasah dan perguruan MA, serta silaturahmi dengan alumni dan tokoh masyarakat. Pola ini memperlihatkan bahwa komunikasi politik tidak berjalan secara horizontal, melainkan melalui jaringan elite yang tersentralisasi.

Namun demikian, dominasi elite dalam komunikasi politik MA memicu resistensi internal. Sejumlah pengurus dan kader menilai deklarasi politik tersebut sebagai penyimpangan dari *khittah* MA sebagai gerakan kultural non-partisan. Ketua PBMA, Sadeli Karim, secara tegas menyatakan: “*Sejak muktamar, MA sudah dinyatakan*

independen. Saya bertekad dalam kepemimpinan saat ini, organisasi harus netral dan independen” (Sadeli Karim, dikutip dari Iin, 2018). Pernyataan ini menunjukkan adanya ketegangan antara elite struktural wilayah dan elite pusat dalam menafsirkan peran politik organisasi.

Penolakan juga datang dari sebagian elite wilayah dan kader, seperti Herman Fauzi, yang bahkan memilih keluar dari struktur PWMA Banten sebagai bentuk protes atas deklarasi politik tersebut. Menurutnya, dukungan politik atas nama organisasi tidak hanya melanggar khittah MA, tetapi juga mencederai pendidikan politik warga MA yang seharusnya menjunjung netralitas dan etika berpolitik (Iin, 2018). Fenomena ini menegaskan bahwa komunikasi politik yang elitis dan top-down berpotensi merusak kohesi internal organisasi.

Dari sudut pandang teori dramaturgi Erving Goffman, Babay Sujawandi juga menampilkan diri sebagai aktor politik yang memainkan peran ganda antara *front stage* dan *back stage*. Di ruang publik, ia menampilkan citra sebagai pemimpin moral yang memperjuangkan kepentingan umat dan organisasi. Sementara di balik layar, keputusan politik lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan strategis elite, termasuk kepentingan jangka panjang organisasi dan individu (Goffman, 1959).

Dengan demikian, komunikasi politik elite MA dalam Pilkada Banten 2017 memperlihatkan ketegangan antara ideal komunikasi politik Islam yang berbasis musyawarah dan praktik komunikasi elitis yang bertumpu pada otoritas simbolik elite. Peran elite sebagai komunikator politik memang efektif dalam memobilisasi dukungan, tetapi sekaligus menimbulkan fragmentasi internal dan krisis legitimasi organisasi. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa etika komunikasi politik Islam yang kuat, keterlibatan ormas Islam dalam kontestasi elektoral berisiko menggerus identitas kultural dan kepercayaan umat.

Fragmentasi Internal dan Deviasi Khittah

Fragmentasi internal yang terjadi di tubuh Mathla’ul Anwar (MA) pasca-deklarasi dukungan politik dalam Pilkada Banten 2017 mencerminkan kegagalan komunikasi politik Islam dalam mengelola perbedaan orientasi dan kepentingan politik secara etis dan deliberatif. Dalam perspektif teori komunikasi politik, kondisi ini menunjukkan absennya ruang dialog yang memungkinkan perbedaan pandangan dipertemukan melalui argumentasi rasional dan musyawarah terbuka (Habermas, 1996; Cangara, 2016). Alih-alih menjadi sarana integrasi, komunikasi politik justru berubah menjadi sumber disintegrasi internal organisasi (Iin, 2018).

Secara sosiologis, fragmentasi tersebut membelah MA ke dalam dua kecenderungan utama, yakni faksi struktural dan faksi kultural. Faksi struktural umumnya berasal dari elite organisasi yang terlibat langsung dalam struktur kepengurusan wilayah

dan memiliki kedekatan dengan arena kekuasaan politik. Kelompok ini memandang politik sebagai instrumen strategis untuk memperjuangkan kepentingan umat melalui jalur kekuasaan formal, dengan menggunakan pendekatan *fiqh al-siyasah* yang pragmatis dan kontekstual (Esposito & Voll, 2001).

Sebaliknya, faksi kultural terdiri atas sebagian pengurus, tokoh pendidikan, dan kader MA yang berpegang teguh pada khittah organisasi sebagai gerakan Islam kultural non-partisan. Kelompok ini menempatkan MA sebagai penjaga moral publik (*moral guardian*) yang seharusnya menjaga jarak kritis dari politik praktis demi mempertahankan independensi dan otoritas etik organisasi. Dalam pandangan mereka, keterlibatan politik elektoral secara terbuka berisiko mereduksi MA menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Perbedaan orientasi ini tidak dikelola melalui mekanisme komunikasi internal yang sehat. Dalam kerangka komunikasi politik Islam, konflik semacam ini seharusnya diselesaikan melalui *syura* dan dialog deliberatif yang inklusif. Namun, dalam kasus MA, proses musyawarah dinilai tidak berjalan secara optimal. Keputusan politik lebih banyak disosialisasikan sebagai keputusan elite, bukan dirumuskan sebagai konsensus kolektif organisasi.

Ketegangan internal ini semakin menguat ketika Ketua Pengurus Besar Mathla'ul Anwar (PBMA), KH. Sadeli Karim, secara terbuka menegaskan sikap independensi organisasi. Ia menyatakan, "*Sejak muktamar, Mathla'ul Anwar sudah dinyatakan independen. Saya bertekad dalam kepemimpinan saat ini, organisasi harus netral dan tidak terseret ke politik praktis*" (Sadeli Karim, dikutip dari Iin, 2018). Pernyataan ini menjadi penanda jelas adanya perbedaan tafsir khittah antara elite pusat dan elite wilayah.

Fragmentasi internal juga tampak dalam sikap sebagian pengurus wilayah dan kader yang menolak deklarasi politik tersebut. Salah satu tokoh MA, Herman Fauzi, bahkan memilih mundur dari kepengurusan PWMA Banten sebagai bentuk protes. Ia menilai bahwa dukungan politik atas nama organisasi telah melanggar prinsip dasar MA sebagai gerakan pendidikan dan dakwah. Menurutnya, "*Keputusan politik itu tidak pernah dimusyawarahkan secara menyeluruh dan mencederai khittah organisasi*" (Herman Fauzi, dikutip dari Iin, 2019).

Dari sudut pandang komunikasi politik, situasi ini menunjukkan kegagalan fungsi komunikasi internal sebagai sarana pendidikan politik (*political education*). Komunikasi politik yang seharusnya mencerahkan dan memberdayakan anggota justru bersifat instruktif dan *top-down*. Pesan politik dipersepsi sebagai perintah kekuasaan elite, bukan sebagai hasil proses kolektif organisasi (Nimmo, 2005). Akibatnya, solidaritas internal melemah dan kepercayaan antarstruktur organisasi mengalami erosi.

Deviasi khittah MA dalam konteks ini tidak semata bersifat organisatoris, tetapi juga normatif. Dalam Pemikiran Politik Islam, ormas keagamaan memiliki fungsi etis untuk menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan agar tetap mampu menjalankan peran amar

ma'ruf nahi munkar secara objektif (al-Mawardi, 1996). Ketika ormas terlalu dekat dengan kekuasaan, fungsi kritik moral berpotensi tumpul dan digantikan oleh logika kepentingan politik jangka pendek (Hefner, 2011).

Fragmentasi internal MA juga memperlihatkan apa yang oleh para akademisi disebut sebagai krisis representasi dalam organisasi keagamaan. Elite organisasi mengklaim berbicara atas nama umat, sementara sebagian anggota merasa tidak terwakili dalam keputusan strategis. Kondisi ini sejalan dengan temuan Fealy dan White (2008) bahwa keterlibatan ormas Islam dalam politik elektoral sering kali memicu konflik internal akibat perbedaan antara logika organisasi dan logika politik.

Dengan demikian, fragmentasi internal dan deviasi khittah MA dalam Pilkada Banten 2017 merupakan konsekuensi dari kegagalan komunikasi politik internal yang berlandaskan etika Islam. Tanpa mekanisme musyawarah yang inklusif dan transparan, komunikasi politik kehilangan fungsi integratifnya dan justru memperdalam polarisasi. Kasus MA menegaskan bahwa keterlibatan ormas Islam dalam politik elektoral harus selalu dipandu oleh prinsip komunikasi politik Islam agar tidak mengorbankan identitas kultural, kohesi internal, dan kepercayaan umat.

Implikasi terhadap Pemikiran Politik Islam

Kasus komunikasi politik Mathla'ul Anwar (MA) di Banten memperkaya diskursus Pemikiran Politik Islam, khususnya dalam membaca ketegangan antara idealisme normatif Islam dan realitas demokrasi elektoral modern. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa keterlibatan ormas Islam dalam politik elektoral sering kali menempatkan organisasi keagamaan pada posisi dilematis: antara menjaga integritas moral dan merespons tuntutan pragmatis demokrasi (Fealy & White, 2008). Temuan tesis ini menegaskan bahwa tanpa kerangka komunikasi politik Islam yang kokoh, ormas Islam rentan terjebak dalam pragmatisme politik yang mengabaikan dimensi etik, edukatif, dan transformatif dari dakwah politik Islam.

Dalam perspektif teoretis Pemikiran Politik Islam, komunikasi politik seharusnya tidak dipahami semata sebagai teknik persuasi atau mobilisasi dukungan, melainkan sebagai praksis etis yang mengintegrasikan nilai (*qiyam*), prosedur (*shura*), dan tujuan (*masalah*). Al-Qaradawi (1997) menegaskan bahwa politik Islam kehilangan legitimasinya ketika masalah ditafsirkan secara sempit dan terlepas dari mekanisme musyawarah. Kasus MA menunjukkan bahwa kegagalan mengintegrasikan ketiga unsur tersebut menjadikan komunikasi politik kehilangan daya transformasinya dan berubah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan.

Implikasi penting lainnya adalah munculnya problem *ijtihad politik* dalam tubuh ormas Islam. Dalam Pemikiran Politik Islam kontemporer, *ijtihad politik* diperlukan untuk merumuskan sikap politik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam sekaligus realistis dalam

menghadapi sistem politik modern (Esposito & Voll, 2001). Kasus MA di Banten memperlihatkan bahwa ijtihad politik yang tidak dikomunikasikan secara deliberatif dan kolektif justru memicu konflik internal dan delegitimasi kepemimpinan. Dengan demikian, tesis ini memperkuat argumen bahwa ijtihad politik tidak hanya soal substansi keputusan, tetapi juga soal etika dan proses komunikasinya.

Secara kontekstual, temuan penelitian ini memiliki signifikansi khusus bagi Pemikiran Politik Islam dalam membaca realitas politik Banten. Politik Banten dikenal kuat dipengaruhi oleh politik jawara dan politik dinasti, di mana relasi kekuasaan dibangun melalui jaringan patronase, simbol kultural, dan otoritas informal (Hamid, 2014). Dalam konteks seperti ini, ormas Islam berpotensi menjadi sumber legitimasi simbolik bagi kekuasaan lokal. Kasus MA menunjukkan bahwa ketika komunikasi politik tidak dikelola secara kritis, ormas Islam dapat terseret menjadi bagian dari reproduksi kekuasaan oligarkis yang justru bertentangan dengan prinsip keadilan dan amar ma'ruf nahi munkar.

Dengan demikian, kontribusi teoretis tesis ini bagi Pemikiran Politik Islam terletak pada penegasan pentingnya komunikasi politik Islam sebagai kerangka normatif sekaligus operasional bagi keterlibatan politik ormas Islam. Bagi konteks Banten, penelitian ini menegaskan bahwa ormas Islam harus mengembangkan model komunikasi politik yang etis, deliberatif, dan kritis terhadap politik dinasti dan jawara. Tanpa kerangka tersebut, keterlibatan politik ormas Islam tidak hanya berisiko mengalami deviasi khittah, tetapi juga kehilangan peran historisnya sebagai penjaga moral publik dan agen transformasi sosial.

KESIMPULAN

Tulisan ini menyimpulkan bahwa komunikasi politik Mathla'ul Anwar dalam kontestasi elektoral Banten 2017 ditandai oleh dominasi elite organisasi sebagai komunikator politik, lemahnya mekanisme musyawarah, serta kecenderungan deviasi dari khittah organisasi sebagai gerakan kultural. Dukungan politik yang dilakukan secara elitis tidak hanya memicu fragmentasi internal, tetapi juga melemahkan fungsi MA sebagai infrastruktur politik masyarakat sipil.

Dalam konteks Pemikiran Politik Islam, temuan ini menegaskan pentingnya etika komunikasi politik, transparansi, dan partisipasi dalam setiap ijtihad politik ormas Islam. Tanpa hal tersebut, keterlibatan politik justru berpotensi mereduksi peran moral dan sosial organisasi keagamaan di tengah masyarakat demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. 2000. *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jabiri, Muhammad 'Abid. 2001. *Al-'Aql al-Siyasi al-'Arabi*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. 1996. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba. 1989. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Buehler, M. (2016). *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cangara, Hafied. 2016. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djuwaeli. 1996. *Sejarah dan Perkembangan Mathla'ul Anwar*. Pandeglang: Pengurus Besar Mathla'ul Anwar.
- Esposito, John L., dan John O. Voll. 2001. *Makers of Contemporary Islam*. New York: Oxford University Press.
- Fealy, Greg, dan Sally White. 2008. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Habermas, Jürgen. 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Hamid, A. (2014). Jokowi's Populism in the 2012 Jakarta Gubernatorial Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33(1), 85–109.
- Hefner, Robert W. 2011. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Ibn Taimiyah. 2005. *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Cairo: Dar al-Hadith.
- McNair, Brian. 2018. *An Introduction to Political Communication*. 6th ed. London: Routledge.
- Nata, Abuddin. 2001. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Nimmo, Dan. 2005. *Political Communication and Public Opinion in America*. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
- Qaradawi, Yusuf al-. 1997. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Rush, Michael, dan Phillip Althoff. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saleh, Fauzan. 2004. *Modern Trends in Islamic Theological Discourse in 20th Century Indonesia*. Leiden: Brill.

- Sarjaya, Syibli. 1996. *Khittah dan Perjuangan Mathla'ul Anwar*. Pandeglang: Pengurus Besar Mathla'ul Anwar.
- Solihin, Iin. *Komunikasi Politik Mathla'ul Anwar dalam Kontestasi Elektoral di Banten*. Tesis di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), 2018
- Syatibi. 2006. *Biografi KH. Mohammad Entol Yasin*. Pandeglang: Pustaka Menes.